



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DARZAL
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 988200

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.255.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/133 m2 di KAB / KOTA KERINCI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah Seluas 252 m2 di KAB / KOTA KERINCI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 264 m2 di KAB / KOTA KERINCI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 132.500.000**

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS/MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FILANO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 155.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	360.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.902.500.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.902.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.